

Newsletter Pusdatin



Daftar Isi

- Ancaman Siber Tinggi Pusdatin Ajak Insan Pertanian Lindungi Data Pribadi, Halaman 1
- Pusdatin Pimpin Monitoring PAT Padi di Bumi Sriwijaya, Halaman 4
- Brebes Sentra Terbesar Bawang Merah Nasional, Halaman 5
- Penilaian Mandiri SPBE Kementan 2024 Validasi dan Verifikasi Evidence, Halaman 8
- Kedaulatan Data, Kedaulatan Bangsa, Halaman 9
- 17 Agustusan di Pusdatin, Halaman 12

Mohon Kesediannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



bit.ly/surveipusdatin

Ancaman Siber Tinggi Pusdatin Ajak Insan Pertanian Lindungi Data Pribadi

Ancaman Siber masih menjadi problem serius mengingat korbannya masih banyak menyasar kaum perempuan. Untuk itu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bekerjasama dengan *Indonesia Women in Cyber Security (IWCS)* menyelenggarakan seminar dengan tema Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi Bagi Perempuan dan Insan Pertanian. Seminar ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan siber dan pelindungan data pribadi, khususnya bagi anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal sebagai perempuan dan insan pertanian secara umum.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (DWP Setjentan) periode Oktober 2023 - Agustus 2024 Andriana Nurvianti, dalam *Keynote Speech* menyampaikan apresiasinya kepada Pusdatin



Kapusdatin menyerahkan plakat kepada Ketua DWP Setjentan periode Oktober 2023 - Agustus 2024

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom, MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Roydatul Zikria, S.Si, MSE
Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE
Iswadi

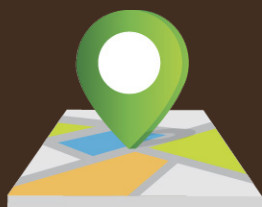
Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Nur Hikmah, S.Stat
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Priatna Sari
Rahma Andany, S.Kom
Marwati
Agung Mahendra, S.Kom
M. Eko Darwanto

Alamat Redaksi



PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 78842029
e-mail : newsletter@pertanian.go.id

yang telah menyelenggarakan acara tersebut. “Sebagai perempuan, kita tidak boleh terlena dan harus semakin peka terhadap pentingnya melindungi diri kita di dunia maya,” kata Andriana Nurvianti di Yogyakarta, Jumat (02/08/2024).

Istri dari Staf Ahli Menteri Pertanian Prihasto Setyanto ini mengatakan kegiatan ini sebagai upaya untuk mencegah potensi kebocoran data pribadi di lingkungan Kementan “Acara hari ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman kita mengenai kesadaran menjaga keamanan data pribadi dan mencegah potensi ancaman siber,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Pusdatin Intan Rahayu menyampaikan bahwa lingkupkegiatanini lebih fokus membahas berbagai aspek tentang keamanan siber. Diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai ancaman-ancaman siber dan pentingnya melindungi informasi pribadi dan organisasi dari akses yang tidak sah.

“Data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, namun tidak semua orang menyadari pentingnya melindungi data pribadi mereka. Pelindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat,” kata Intan Rahayu.

Sementara itu CEO Xynesis International Eva Y. Noor menyampaikan pentingnya perlindungan data dan keamanan siber untuk melindungi data pribadi, mencegah kerugian finansial, menjaga privasi dan reputasi serta keamanan nasional. “Peran perempuan dalam keamanan siber sangat penting, di antaranya adalah dapat memberikan perspektif yang beragam dalam penanganannya,” ungkap Eva.

Eva mengungkapkan bahwa perempuan yang bergerak di bidang digital sampai saat ini masih belum banyak. Padahal perkembangan serta peluang keamanan siber terus meningkat. Sementara keterwakilan perempuan dalam angkatan kerja keamanan siber masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan



Kapusdatin menyampaikan sambutan dalam Seminar Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi bagi Perempuan dan Insan Pertanian

di bidang teknologi informasi secara umum. “Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi dan keterampilan yang berkembang di bidang siber untuk perempuan,” sebutnya.

Beberapa tokoh perempuan dari berbagai institusi dan industri keamanan siber di Indonesia, berkumpul dan sepakat untuk membuat suatu gerakan yang dinamakan *Indonesia Women in Cyber Security* (IWCS) pada tahun 2021. Gerakan ini merupakan perkumpulan tanpa badan hukum yang bermaksud menjalankan program keamanan siber dengan melibatkan para perempuan sebagai pemangku kepentingan. “Gerakan ini diharapkan dapat menginspirasi dan bekerjasama untuk menguatkan keamanan siber di Indonesia,” bilang Eva yang juga merupakan inisiator lahirnya IWCS ini bersama Intan Rahayu.

Kepala Divisi *Digital Governance Bank INA, Member of Salim Group*, Fenty Tiodor Simanjuntak menambahkan bahwa pelindungan data pribadi ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam undang-Undang tersebut menyebutkan ancaman bagi siapapun yang memperoleh data pribadi yang bukan miliknya untuk tujuan menguntungkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi subjek data pribadi, akan mendapatkan

hukuman penjara 5 tahun dan/atau denda pidana hingga Rp 5 milyar. Ancaman berat lainnya, siapapun yang menggunakan dan membuat data pribadi palsu terutama yang bukan miliknya dapat dikenakan hukuman penjara antara 4 sampai 6 tahun.

Untuk menghindari pencurian data pribadi pada *mobile device* atau handphone menurut Fenty, dapat dilakukan diantaranya dengan tidak menerima WA/SMS/Call dari orang yang tidak dikenal, tidak mengklik tautan/file yang mencurigakan, hindari penggunaan jaringan *wi-fi public* dan gunakan *password* yang kuat serta *two factor authentication* (2FA). “Jangan *share* informasi pribadi di media sosial serta tidak memberikan informasi alamat *email*, PIN, kode OTP kepada siapapun,” tegas Fenty.

Kepala Departemen *Operational Risk Strategy* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Mira Faranty mengingatkan tentang pentingnya kesadaran resiko keamanan transaksi perbankan. Dijelaskannya, dengan proses perbankan yang sudah semakin meluas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan BRI sebagai bagian dari institusi perbankan berupaya menjadi *financial group* yang terdiversifikasi dengan baik dalam skala besar.

Dia menjelaskan bahwa perbankan sebagai bisnis berbasiskan *trust* atau kepercayaan, maka semakin dituntut untuk terus meyakinkan kebutuhan terhadap regulasi seperti pelindungan data pribadi, *digital and operational risk, fraud risk* dan lain-lain. Diapun mengungkapkan berbagai ancaman terhadap keamanan transaksi perbankan. Diantaranya, *SIM Card Swap* dimana pelaku berupaya memperoleh SIM Card untuk mendapatkan sms OTP/*link, user name, password* dan PIN. Kemudian penipuan di *e-commerce* melalui pengiriman uang/pulsa/wallet.

Berikutnya yang marak penipuan melalui undangan palsu via chat dan *website phishing* dimana penipu membuat website palsu untuk meminta *username, password* serta PIN



Para narasumber dan moderator dalam Seminar Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi bagi Perempuan dan Insan Pertanian

yang terhubung dengan perbankan. “Langkah pencegahan harus dilakukan oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah, diantaranya dengan edukasi serta meningkatkan kewaspadaan untuk keamanan transaksi,” jelasnya.

Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bali Nusa Tenggara (Kabapengwil APJII Bali Nusra) Ryan Soma juga menekankan tentang pentingnya strategi kolaborasi penanganan konten negatif di Indonesia. Diakuinya, penyisipan konten negatif di situs pemerintahan dan akademis menjadi salah satu permasalahan utama

yang dihadapi. Saat ini ada sekitar 4 juta konten negatif yang menyusup dalam website pemerintah dengan domain go.id dan akademik dengan domain ac.id.

Permasalahan lainnya, sambung Ryan, tidak efektifnya pemblokiran konten negatifsertatingginyabebanadministratif dalam proses pemblokiran. “Pelaku judi online, misalnya, dapat cepat berpindah domain/IP sehingga pemblokiran hanya menjadi solusi sementara. Pemblokiran IP juga dapat mempengaruhi situs lain yang sah sehingga dapat menyebabkan gangguan layanan,” ujarnya.

Karena itu Ryan menekankan pentingnya memperkuat peran penting keluarga dalam melindungi anggota keluarganya dari potensi bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial. Selain itu masyarakat juga harus proaktif dalam melakukan cek kebenaran informasi yang beredar dan tidak melakukan penyebaran informasi *hoax* di media. Upaya terakhir adalah melaporkan konten negatif, berita *hoax*, *bullying*, ujaran kebencian, predator online ke portal *Trust Positif Kominformo* di <https://trustpositif.kominformo.go.id/>.

Penulis: Wieta B. Komalasari

Pusdatin Pimpin Monitoring PAT Padi di Bumi Sriwijaya



Tim Pusdatin, BSIP serta BPS Pusat dan Daerah melakukan pengecekan lahan sawah PAT di Desa Tanjung Lago, Banyuwangi

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan Penambahan Areal Tanam (PAT) Padi di

Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja ini dalam rangka monitoring capaian PAT di Bumi Sriwijaya.

Hadir dalam kegiatan monitoring ini Kepala Pusdatin Kementan Intan Rahayu, Direktur Statistik Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik (BPS) Eko Marsoro, perwakilan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan, dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

Tim Pusdatin Kementerian Pertanian yang dikomandoi oleh Kepala Pusdatin ini lebih dulu menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa (16/07/2024). Hasil rapat koordinasi ini menjadi bahan untuk monitoring bersama antar seluruh

elemen yang terkait PAT termasuk koordinator penyuluh pertanian sebagai ujung tombak kegiatan pertanian.

“Rapat koordinasi ini terkait PAT yang terdapat di dua kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Kegiatan PAT di kedua kabupaten tersebut terdiri dari PAT Padi Gogo dan PAT Optimasi Lahan Rawa (Oplah),” kata Intan.

Mantan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri di Badan Siber dan Sandi Negara ini kemudian memimpin rombongan menuju 2 lokasi PAT Oplah, yakni di Desa Kuala Putian dan Desa Tanjung Lago, yang berada di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.

Dari hasil kunjungan ini ditemukan bahwa luas lahan oplah di Desa Kuala Puntian seluas 294 hektare dan berada di luar titik Kerangka Sampel Area (KSA) BPS. Pola tanam awal di Lokasi adalah padi - jagung dengan 2 kali PAT untuk padi. Setelah ada giat oplah menjadi padi – padi dan Indeks

Pertanaman (IP) 300 padi baru 120 hektare.

Hasil monitoring di Desa Tanjung Lago juga diperoleh data bahwa luas lahan oplah seluas 133 hektare dan lokasi berada di luar titik KSA. Pola tanam awal padi – jagung dengan 2 kali PAT untuk padi. Setelah adanya kegiatan oplah, pola tanam menjadi padi – padi dan IP 300.

Selain melihat kondisi lahan padi, Tim Pusat dan Daerah juga mencocokkan lahan dengan polygon hasil digitasi yang menggunakan aplikasi Avenza. Selain monitoring PAT di Kabupaten Banyuasin monitoring sawah juga dilakukan di Desa Muara dan Desa Lubuk Makmur di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Khusus untuk lokasi ini merupakan daerah hutan jati yang dibuka untuk PAT. “Di lokasi ini sebagian tanaman padi sudah memasuki masa panen dan di lokasi berdekatan lainnya tanaman padi masih berada pada fase generatif 1 dan vegetatif,” sebut Intan.

Penulis : Ulliyah

Brebes Sentra Terbesar Bawang Merah Nasional



Bawang merah yang sedang diangin-anginkan setelah panen untuk menjadi wujud askip

Brebes, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, telah lama dikenal sebagai salah satu penghasil bawang merah terbesar di Tanah Air. Bahkan, predikat "Kota Bawang" sering disematkan pada Brebes, mengingat kontribusi daerah ini dalam memenuhi kebutuhan bawang merah di tingkat nasional. Daerah ini memberikan kontribusi 14,59 persen terhadap produksi nasional pada tahun 2023. Keberhasilan

Brebes sebagai penghasil bawang merah tidak lepas dari kondisi geografisnya yang mendukung. Tanah di Brebes dikenal subur, dengan tekstur tanah lempung berpasir yang cocok untuk pertumbuhan bawang merah. Iklim tropis dengan curah hujan yang cukup serta intensitas cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun juga menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan bawang merah di wilayah ini.

Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian Pusdatin melakukan kajian perbaikan perhitungan neraca pangan di Brebes pada Selasa (16/07/2024) sampai Jumat (19/07/2024). Komoditas hortikultura, utamanya komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu bawang merah dan cabai dipilih menjadi komoditas yang diamati. Kegiatan ini diawali dengan rapat koordinasi antara Pusdatin dengan Ditjen Hortikultura dan Bapanas. “Kegiatan kajian ini bertujuan untuk perbaikan angka konversi susut dan wujud produksi bawang merah dan cabai,” kata Ketua Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian Sri Wahyuningsih.



Cold Storage yang dikelola oleh champion bawang merah di Desa Sida Mulya Kecamatan Wanasari

Penanaman bawang merah di Kabupaten Brebes biasanya dilakukan 3 kali tanam dalam setahun, dengan periode panen raya sekitar Juni sampai dengan Juli. Varietas yang ditanam petani umumnya adalah varietas Bima Brebes, dengan rata-rata produksi rogol per hektare sekitar 11,9 ton dan produksi total per tahun sekitar 500 ribu ton. "Produksi ini hanya sekitar 1,5 persen yang digunakan untuk kebutuhan Kabupaten Brebes, sisanya dipasok ke daerah lain," tambah Sri.

Harga *Break Event Point* (BEP) bawang merah di Brebes sekitar Rp 15.000/kg (17 Juli 2024) atau di bawah BEP Provinsi Jawa Timur dan NTB. Harga yang dianggap aman oleh petani adalah sebesar Rp 20.000 per kg. Berdasarkan penghitungan analisis usaha tani, biaya produksi bawang merah per hektare mencapai 120,11 juta rupiah dengan komponen terbesar yaitu untuk pembelian benih (48,34 persen) dan upah tenaga kerja (30,80 persen).

Pengamatan lapangan di Kabupaten Brebes dilakukan di 5 (lima) kecamatan sentra bawang merah dan cabai (cabai besar dan cabai rawit) yaitu Kecamatan Larangan, Ketanggungan, Tanjung, Bulakamba dan Wanasari dengan total sampel sebanyak 24 responden. Pengamatan dilakukan melalui wawancara kepada petani dan pedagang.

Salah satu program Ditjen Hortikultura untuk mendukung pengamanan pasokan dan harga pangan, adalah membentuk petani champion di daerah sentra. Petani champion ini adalah petani penggerak sekaligus pedagang besar yang menjadi mitra pemerintah, dalam hal ini Kementan untuk mendukung stabilisasi

pasokan dan harga suatu komoditas. Tiga champion yang diwawancarai adalah Juwari dan Dian Alex Chandra yang berasal dari Kecamatan Wanasari serta Ikhwan dari Kecamatan Bulakamba.

Meskipun Kabupaten Brebes merupakan sentra produksi bawang merah nasional, untuk memenuhi kebutuhan lokalnya kabupaten ini juga mendatangkan bawang merah dari wilayah lain. Oleh karena itu jenis bawang merah yang ada di pasaran bukan hanya varietas Bima Brebes saja tetapi ada juga varietas Philip (asal dari NTB), Biru Batu (asal dari Probolinggo Jatim), dan Tajuk (asal dari Nganjuk Jatim). "Besarnya volume bawang merah yang diperdagangkan dari wilayah Brebes Raya mulai dari Kabupaten Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang hingga Batang mencapai 70 persen, sedangkan sisanya 30 persen berasal dari provinsi lain seperti NTB dan Jawa Timur," ungkap Juwari.

Penjualan antar pulau umumnya dalam wujud bawang merah konde kering, sedangkan penjualan ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) umumnya dalam wujud rogol basah dan diangin-anginkan. Salah satu champion yaitu Ikhwan, melakukan pengiriman wujud konde kering ke wilayah Palembang, Jambi, dan Medan sebesar 7-8 ton dengan frekuensi 3-4 kali per minggu. Sementara Alex dalam 1 tahun dapat menjual 6.500 ton bawang merah yang berasal dari 50 persen produksi tanaman sendiri dan 50 persen membeli dari petani lain.

"Perkiraan besaran tercecer saat pengangkutan dari petani ke lokasi usaha pedagang adalah 1,5 persen – 2 persen yang disebabkan oleh bawang merah yang rusak dan busuk selama perjalanan," ujar Alex. Lebih jauh Alex menjelaskan bahwa perkiraan tercecer saat bongkar muat sebanyak 0,3 persen. Penyimpanan bawang dapat dilakukan paling lama 5 bulan dengan menggunakan *cold storage*. Bawang yang disimpan dalam *cold storage* selama 3 bulan kadar airnya akan menyusut.

"Penyimpanan bawang merah selama 1 bulan di *cold storage* dengan suhu

3-5°C, mengalami susut bawang sebesar 5-7 persen,” jelas Juwari. Kapasitas penyimpanan *cold storage* yang efisien minimal 8 ton dan maksimal 16 ton. Cara penyimpanan lainnya bisa dengan cara diangin-anginkan dengan lama penyimpanan 1 bulan untuk bawang konsumsi dan 2 bulan untuk benih. Penyusutan dengan cara penyimpanan ini lebih besar yaitu 20-35 persen dibandingkan penyimpanan dengan *cold storage*.

Kecamatan Larangan sebagai sentra bawang merah berkontribusi 20 persen terhadap luas panen bawang merah Kabupaten Brebes. Kecamatan ini juga menjadi sentra cabai rawit hijau dengan kontribusi lebih dari 70 persen. Hasil wawancara dengan Nasrudin, seorang petani bawang merah yang berlokasi di Desa Poncol, mengatakan bahwa kegiatan tanam terakhir seluas $\frac{1}{4}$ bahu atau setara 1.750 m². dilakukan bulan Mei 2024 dan panen di bulan Juli 2024. “Untuk luas lahan $\frac{1}{4}$ bahu, benih yang digunakan sebanyak 3 kuintal konde kering ukuran sedang atau 1– 1,5 kuintal konde kering ukuran kecil,” kata Nasrudin.

Hasil panen pada Juli 2024 ini menurun dibandingkan biasanya karena sebagian gagal panen akibat hama. Produksi yang dihasilkan dalam wujud konde basah 1,4 ton dengan harga jual Rp 13.000 per kg. Selama ini harga jual tertinggi yang pernah diterima petani adalah Rp 30.000 per kg. Angka konversi wujud produksi dari konde basah ke konde kering berkisar antara 71,43 persen - 76,92 persen, sementara dari konde kering menjadi rogol kering sekitar 70 persen.

Ratub, seorang petani cabai rawit hijau yang berlokasi di Dukuh Mengkreng, Kecamatan Larangan, terakhir menanam pada bulan Mei dan mulai panen pada bulan Agustus 2023 di lahan seluas 1 Ha dengan penggunaan benih sekitar 25 kg. “Harga jual pada saat itu sekitar Rp.30.000 per kg,” kata Ratub.

Pemanenan cabai rawit hijau ini dilakukan 2 minggu sekali dengan total 10-12 kali petik dimana produksi tertinggi terjadi

pada pemetikan ke 5 sampai 7. Hasil panen milik Ratub ini langsung dikirim ke Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu tanpa melalui proses penyimpanan. Lokasi tujuan penjualan cabai rawit hijau miliknya adalah 95 persen ke pasar induk, 3 persen ke pedagang grosir, dan 2 persen ke pedagang eceran.

Sanudin seorang petani andalan cabai merah besar di Desa Krakahan Kecamatan Tanjung, menanam cabai merah besar yang ditumpangsarikan dengan tanaman bawang merah. “Untuk luas tanam 0,5 bahu atau 3.500 m² penggunaan benih lokalnya sebanyak 10 kg cabai segar seharga Rp 20.000/kg yang dikeringkan lalu diambil biji dan dijadikan benih,” jelas Sanudin. Periode tanam bulan Januari 2024 dipanen pertama bulan Maret-Mei 2024. Umur panen cabai merah ini sekitar 120 hari, dengan pemetikan 15 sampai 17 kali dan puncak panen pada pemetikan ke 7 dan 8.

Harga cabai saat wawancara sekitar Rp 20.000/kg. Petani tidak melakukan proses penanganan pasca panen. Setelah pemanenan cabai langsung dikemas dan dikirim ke pedagang pengumpul. Sortasi produk dilakukan di tingkat pedagang, sehingga di tingkat petani hampir tidak ada susut atau kehilangan yang terjadi.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Brebes telah membuktikan dirinya sebagai salah satu daerah sentra bawang yang paling penting di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan alam yang subur, keahlian petani yang terus berkembang, serta inovasi teknologi yang diterapkan dalam proses budidaya. Dengan terus menjaga kualitas dan produktivitas, Brebes berpotensi untuk semakin memperkuat posisinya di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian di Brebes, terutama dalam budidaya bawang, harus terus didorong untuk kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penulis: Sabarella

Penilaian Mandiri SPBE Kementan 2024 Validasi dan Verifikasi Evidence



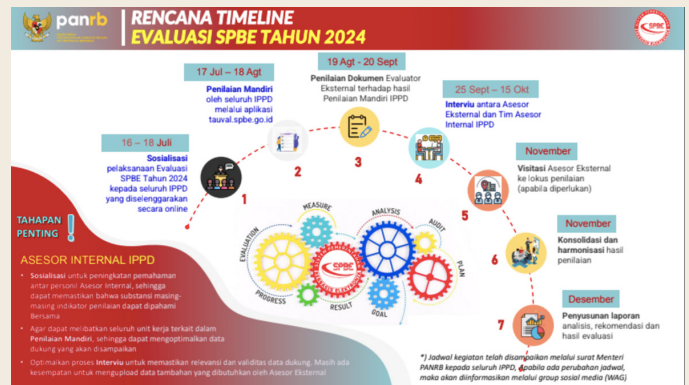
Kegiatan validasi dan verifikasi evidence penilaian mandiri SPBE Kementan 2024 di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta, Rabu (7/8/2024)

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. Proses evaluasi ini akan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2024. Hal ini disampaikan berdasarkan *timeline* resmi yang telah dirilis oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan *timeline* Kementerian PANRB tersebut, Pusdatin secara berkesinambungan menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Evaluasi Mandiri SPBE 2024 Kementan dalam bulan ini. Rapat pertama, Rapat Koordinasi Validasi dan Verifikasi *Evidence* Penilaian Mandiri SPBE Kementan 2024 di Hotel RA Suites Simatupang Jakarta pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Setelah rapat ini seminggu kemudian akan diadakan rapat finalisasi.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Kelompok Pengembangan Sistem Informasi (PSI) Pusdatin, Bayu Mulyana menyatakan, "Pertemuan hari ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penyiapan *evidence* evaluasi SPBE Kementan tahun 2024 dan selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim asesor internal Pusdatin".

Selanjutnya, "Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi diharapkan para penanggung jawab indikator dan PIC dari Pusdatin bisa menindaklanjuti dengan melengkapi atau menyesuaikan narasi dan *evidence* sesuai catatan dari tim evaluator internal," pesan Bayu dalam rakor (7/8/2024).



Rencana *timeline* evaluasi SPBE tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB

Sesuai *timeline*, tahapan awal evaluasi akan diawali dengan penilaian mandiri oleh masing-masing Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) melalui aplikasi tauval.spbe.go.id. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian oleh asesor eksternal terhadap hasil penilaian mandiri tersebut. Tahapan penting lainnya adalah visitasi oleh asesor eksternal ke lokasi penilaian jika diperlukan.

Evaluasi SPBE tahun 2024 dimulai dengan sosialisasi yang intensif kepada seluruh instansi pemerintah pada 16-18 Juli. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme dan tujuan evaluasi. Setelah sosialisasi, masing-masing instansi pemerintah kemudian melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungannya. Penilaian mandiri ini dilakukan secara mandiri oleh setiap instansi melalui aplikasi tauval.spbe.go.id.

Setelah tahap penilaian mandiri selesai, tim asesor eksternal dari Kementerian PANRB akan melakukan penilaian lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen hasil penilaian mandiri yang telah diunggah oleh masing-masing instansi. Penilaian dokumen ini berlangsung mulai 19 Agustus hingga 20 September. Selain itu, untuk memastikan akurasi data, tim asesor internal instansi juga akan melakukan wawancara dan verifikasi terhadap data-data yang telah dilaporkan.

Pada bulan November, tim asesor eksternal dapat melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke lokasi instansi jika diperlukan. Visitasi ini bertujuan untuk

melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memverifikasi data yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah semua data terkumpul, baik dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, maupun hasil visitasi, tim asesor akan melakukan konsolidasi dan harmonisasi hasil penilaian.

Rakor ini mengundang semua anggota Tim Asesor SPBE Kementan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 991/KPTS/OT.050/A03/2024 tentang Tim Asesor Internal Penilaian Mandiri Penerapan SPBE lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan validasi dan verifikasi *evidence* penilaian mandiri SPBE Kementan tahun 2024. Rakor dibuka oleh Ketua Kelompok PSI Pusdatin Bayu Mulyana mewakili Kepala Pusdatin yang berhalangan hadir, dilanjutkan dengan sesi validasi dan verifikasi *evidence* oleh Tim Asesor Internal SPBE. Kegiatan dimulai pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 16.00.

Berdasarkan identifikasi, sudah semua indikator diunggah ke aplikasi tauval, tetapi belum semua bukti pendukung tersedia. Oleh karena itu diharapkan dukungan dari

semua penanggung jawab indikator dan PIC untuk memperbaiki dan melengkapi narasi dan *evidence* yang dibutuhkan.

Tahap akhir dari proses evaluasi SPBE adalah penyusunan laporan hasil evaluasi. Laporan ini akan berisi analisis mendalam mengenai hasil penilaian, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-masing instansi. Laporan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Hasil dari evaluasi SPBE ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana penerapan SPBE di seluruh Indonesia. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

Kedaulatan Data, Kedaulatan Bangsa



Mungkin diantara pembaca Newsletter masih ada yang ingat, di tahun 2010 ada beberapa negara yang secara intensif melakukan penyelidikan terkait pelanggaran privasi dari *platform* digital di beberapa layanan aplikasi daring. Hal tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, karena ada data pribadi yang terindikasi dipergunakan untuk keuntungan sepihak. Para pengguna secara tidak sadar dimanjakan oleh beberapa fitur yang sangat memudahkan untuk diakses, namun diam-diam data pribadinya digunakan tanpa persetujuan pemiliknya.

Sebagai salah satu contoh, ada aplikasi Google yang memanjakan pengguna dengan gambar-gambar menakjubkan dari kota-kota besar dan sudut-sudut di beberapa bagian dunia yang lain secara 360'. Tamasya mata kini telah dimungkinkan melalui ujung jari dan gawai pribadi, meskipun secara virtual.

Namun, ketika sampai pada titik lokasi tepat di depan rumah sendiri, muncul pertanyaan “aman ga ya buat saya dan keluarga?”, “waduh, jendel rumah saya jadi banyak yang tahu kalau tidak berteralis”.

Perlu untuk diketahui, dibalik aplikasi *Street View* tersebut Google secara bebas melakukan pengambilan gambar tanpa persetujuan dari pemilik rumah yang dilewati oleh mobil Google *Street View* sebagai “alat” pengambil gambar. Belum lagi aplikasi-aplikasi Google lain yang tanpa disadari, data-data pengguna diambil secara sepihak. Meskipun Google telah menjamin data-data pengguna tidak akan digunakan untuk keuntungan sepihak, namun pihak-pihak berwenang di beberapa negara merasa hal ini perlu untuk untuk ditindaklanjuti ke ranah hukum.

Belum lagi kasus yang terjadi di tahun 2018, Komite Parlemen Inggris menemukan fakta bahwa ada seorang profesor dari Universitas Cambridge telah menjual data-data di Facebook ke pihak ketiga. Publik yang mengetahui dibuat marah, dan menuntut Facebook untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran keamanan atas penjualan data pribadi secara tidak sah.

Media sosial saat ini yang berkembang sangat masif diakui tak bisa dipisahkan dari perilaku keseharian warga negara yang aktif menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial. Dalam setiap aplikasi digital platform baik media sosial, mesin pencari, aplikasi *e-commerce* yang beroperasi di ruang siber memiliki sangat banyak data yang semestinya sudah terjamin keamanannya. Para pengguna semakin terlena dan tidak sadar bahwa aktifitasnya direkam dan diolah lalu dipakai untuk keuntungan perusahaan aplikasi, alih-alih sebagai alat untuk membantu “memudahkan kehidupan”. Kekhawatiran akan penyalahgunaan yang berpotensi menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, perlu untuk disikapi secara kehati-hatian. Telah menjadi rahasia umum, bahwa perusahaan-perusahaan aplikasi media sosial raksasa sangat bergantung kepada data pengguna sebagai penghasilan yang menguntungkan bagi mereka.

Namun di sisi lain, pelanggaran privasi tentu perlu penindakan tegas jika sudah melakukan perampasan hak milik (baca: data pribadi) secara sepihak.

Lalu apa bedanya dengan para penjajah di era revolusi fisik pada masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia?

“Ah, kasus-kasus itu ‘kan bukan di Indonesia!”

Oya? Seberapa yakin anda bisa menjamin keamanan semua data yang anda tulis dan bagikan, lalu diunggah di media sosial?

Mari kita bahas sedikit, mumpung masih di bulan Agustus nih..

Menyikapi peristiwa dan kondisi seperti yang diceritakan terkait Google dan Facebook tersebut, sudah semestinya jika peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya sekedar momentum untuk mengenang perjuangan pahlawan yang merebut kemerdekaan. Hari kemerdekaan juga saat yang tepat untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan dalam konteks lebih luas dan kekinian. Salah satu dari banyak aspek penting kemerdekaan di era digital saat ini adalah kedaulatan data, yaitu terutama perlindungan data pribadi.

Kedaulatan Data di Era Digital

Kedaulatan data adalah hak suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan data yang berada di dalam yurisdiksinya, termasuk data yang dimiliki oleh warganya. Data menjadi aset yang sangat berharga di era globalisasi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Data tidak semata-mata digunakan untuk keperluan bisnis, tetapi juga untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penguasaan dan pengendalian atas data ini menjadi sangat krusial dan strategis.

Bagi Indonesia, sejatinya kedaulatan data adalah bagian dari kedaulatan negara yang harus dipertahankan. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya hal ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang ada di dalam negeri dapat dilindungi dan diatur sesuai dengan kepentingan nasional.

Salah satu wujud konkret dari upaya ini adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pelindungan Data Pribadi sebagai Wujud Kedaulatan

Pelindungan data pribadi adalah aspek yang tak terpisahkan dari kedaulatan data. Di era digital, data pribadi menjadi komoditas yang sangat bernilai. Kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan risiko yang besar, seperti penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, hingga pencurian identitas.

Dengan diberlakukannya UU PDP, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi data pribadi warganya dari ancaman-ancaman tersebut. UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana data pribadi harus diperlakukan, termasuk hak-hak subjek data dan kewajiban para pengendali data. Melalui regulasi ini, Indonesia berusaha memastikan bahwa data pribadi warganya dikelola dengan aman dan transparan, serta hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan kepentingan nasional. Pendekatan melalui perangkat aturan negara telah sering dipakai untuk pelindungan warga negara, termasuk pelindungan data pribadi. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah, pendekatan pengamanan oleh warga negara sendiri. Apa yang harus dimulai terlebih dahulu oleh warga negara sebagai individu pemegang data pribadi?

Pola Pikir Kekinian Tentang Kemerdekaan

Jika kita merefleksikan makna kemerdekaan di era digital, kedaulatan data menjadi salah satu aspek yang sangat relevan. Kemerdekaan suatu bangsa di era ini tidak hanya diukur dari kemampuannya untuk mengatur urusan dalam negeri, tetapi juga dari kemampuannya untuk melindungi aset-aset digitalnya, termasuk data. Dengan menjaga kedaulatan data, Indonesia tidak hanya melindungi privasi warganya tetapi juga memastikan bahwa sumber

daya digital dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi data warganya dari berbagai bentuk eksploitasi, baik oleh pihak asing maupun oleh entitas domestik yang tidak bertanggung jawab. Melalui penguatan regulasi seperti UU PDP dan pengembangan infrastruktur digital yang aman, Indonesia berupaya untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejati.

Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, penting untuk merenungkan bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang kemerdekaan di dunia digital. Kedaulatan data, yang diwujudkan melalui pelindungan data pribadi, merupakan salah satu pilar utama dari kemerdekaan di era digital. Dengan melindungi data pribadi warganya, Indonesia tidak hanya menjaga privasi, tetapi juga kedaulatan dan keamanan nasional. Ini adalah bentuk nyata dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam konteks yang lebih modern dan relevan dengan tantangan zaman. Namun perlu diingat, bahwa pola pikir kesadaran atas keamanan data pribadi adalah juga tanggung jawab setiap individu di dunia digital saat ini. Keamanan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan pelindungan informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana data kita digunakan dan dibagikan di dunia maya.

Untuk itu bukanlah hal yang berlebihan jika menambah arti kemerdekaan, salah satunya dengan peningkatan kesadaran serta selalu proaktif atas pelindungan data setiap warga negara dari setiap ancaman yang ada. Kesadaran untuk melindungi segala informasi pribadi adalah langkah awal menuju keamanan yang lebih baik dan pelindungan data pribadi yang lebih efektif. Yuk bisa yuk, kita jaga dan amankan data pribadi.

Dirgahayu Indonesia..... aman datanya, kuat bangsanya.

Penulis : Apriadi Setiawan

17 Agustusan di Pusdatin



Karyawan dan karyawan Pusdatin memeriahkan HUT RI ke-79

Dalam rangka turut memeriahkan HUT RI ke-79, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) menyelenggarakan berbagai macam perlombaan yaitu lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku dalam botol, lomba mengeluarkan bola dari kardus, lomba rebut bola, lomba lari sambung balon, dan ping pong fun. Seluruh rangkaian acara pada HUT RI tahun 2024 dimulai dari mendekorasi seluruh ruangan yang ada di Pusdatin. Dekorasi ruangan didominasi oleh warna merah dan putih yang merepresentasikan warna bendera Indonesia.

Seperti pada HUT RI tahun-tahun sebelumnya, Pusdatin juga berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga di lingkup Kementerian Pertanian. Tim Pusdatin pada tahun ini mengirimkan para atletnya untuk berlaga pada cabang olahraga tenis meja yaitu Sri Wahyuningsih yang turun di nomor ganda putri berpasangan dengan Eka Susanti dari Biro Umum dan Pengadaan dan Darmadi



Perwakilan Pusdatin dalam lomba tenis meja lingkup Kementan

yang turun di nomor ganda campuran berpasangan dengan Revi Yuliani dari Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Sementara itu pada cabang olahraga futsal, Pusdatin mengirimkan atletnya yaitu Doni. Berita menggembirakan datang dari cabang olahraga futsal, tim Sekretariat Jenderal (Setjen) berhasil menjadi juara ke-2 setelah di partai puncak dikalahkan oleh tim Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dengan skor 2 - 6.

Seluruh rangkaian acara dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 di lingkup Kementerian Pertanian, ditutup dengan acara jalan santai sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang masing-masing cabang olah raga, yang pada tahun ini mengambil tempat di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian, Jl. Sinarmas Boulevard, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penulis: Dhanang S



Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian

satudata.pertanian.go.id